

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena globalisasi telah secara menyeluruh menimpa penjuru negara yang mengakibatkan dampak dari jalinan hubungan yang efektif dan juga efisiensi terkait interaksi diantara manusia secara langsung maupun tidak secara langsung. Era globalisasi mempengaruhi perkembangan terhadap kecanggihan teknologi. Kecepatan penyebaran budaya telah berubah karena transformasi teknologi. Beragam ide, informasi, barang dan jasa pun sudah terjamah oleh globalisasi berdampak nyata karena keberadaan kemajuan teknologi komunikasi dan media.

Terlihat dari pesatnya perkembangan teknologi pada masa kini sehingga dapat dibutuhkan penyesuaian terhadap teknologi demi menopang keberjalanan dalam berkehidupan, terutama bagi pemerintah karena sebagai penyedia layanan kepada masyarakat pun dituntut bisa mampu dalam pemenuhan memanfaatkan teknologi guna keberlangsungan perkembangan kegiatan pelayanan. Kemajuan teknologi memiliki dampak langsung pada aktivitas administratif di instansi pemerintahan, dimana akan ada pembaharuan ataupun penggunaan teknologi yang revolusioner, sehingga lembaga harus selalu berupaya menyesuaikan adaptasi dan berlanjut memanfaatkannya (Suraja, 2018).

Interpretasi arti menurut Hidayaningrat yang dikutip oleh Suwondo mengenai pelayanan publik, ialah penglihatan bahwa terdapat perubahan paradigma, dengan cara memfasilitasi beragam fokus yang lebih mendalam untuk

manajemen pelanggan yang sepadan dengan evolusi administrasi publik dalam capaian pelayanan yang prima dan berkualitas tinggi. Berupaya menghadirkan rasa nyaman sekaligus membantu pemenuhan masyarakat dalam keterbutuhan mencapai efektivitas, efisiensi, dan pemangkasan biaya (Wiranti & Frinaldi, 2023). Karena pada dasarnya, birokrasi identik dengan pola kerja yang tidak sistematis, akibat struktur organisasi tumpang tindih, serta penuh dengan kasus korupsi, kolusi, maupun nepotisme dan disebabkan pula oleh ketidakadaan standart yang tetap (Yusriadi & Misnawati, 2017). Kini birokrasi harus berorientasi melaksanakan kebijakan publik secara akuntabel, efektif, efisien dan juga cepat, agar nantinya bermuara pada segi kualitas dan ketepatan pelayanan dan peningkatan daya saing (Cahyono, 2017).

Segelintir indikator keberhasilan reformasi birokrasi, yakni potensi kecepatan birokrasi dalam pelayanan merupakan salah satunya. Bisa diperhatikan pada peraturan, pemangkasan regulasi, maupun dari penggunaan sistem yang menghambat. Maka sebab itu, pelayanan publik ditekankan agar bisa responsif untuk menghadirkan pelayanan terbaik dengan adanya desakan keakuratan hasil yang diinginkan oleh masyarakat, efektif serta efisiensi dan minimal pengeluaran biaya. Seorang birokrasi juga dituntut mengutamakan pelayanan yang terbaik dengan alur atau birokrasi kerja yang lebih *flexible* serta berorientasi dua arah melalui sistemasi yang pragmatis dan realistis. Hal ini dapat dijelaskan melalui ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dibentuk sebuah Sistem Informasi yang bersifat nasional.

Sistem ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses pelayanan publik. Lebih lanjut, pada Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang yang sama juga dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk mengelola Sistem Informasi yang terdiri dari Sistem Informasi Elektronik atau Non-elektronik. Sistem ini setidaknya harus mencakup transparansi hal penting, antara lain: profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan, serta penilaian kinerja. Pengelolaan sistem informasi yang baik diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat. Pelayanan publik yang ditingkatkan secara digital dapat membuat masyarakat terbantu dalam pemenuhan informasi maupun keperluan layanan cepat tanggap sehingga tergapailah kualitas layanan yang unggul (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Menurut Kim dalam (Oktafrianti et al., 2020), *e-government* harus memuat sejumlah transformasi pengelolaan yang dapat diraih dengan dua cara, di antaranya (1) perubahan dalam pengelolaan bisnis, ini terkait dengan seberapa jauh layanan bisa mencapai kata prima, efisiensi biaya, serta proses administrasi yang di-*update* secara terus-menerus, dan (2) perubahan dalam pemerintahan itu sendiri, seperti adanya pemeriksaan berkelanjutan tentang praktik dan birokrasi demokrasi. Dan manfaat daripada penggunaan aplikasi ialah kemudahan akses, praktis, waktu pengoperasian yang singkat, serta dapat meminimalisir transaksi ilegal selain nominal yang sepatutnya dibayarkan secara resmi (Sawitri et al., 2017)

E-government Terdeklarasikan melalui putusan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan *E-Government* Indonesia bahwa, “Pemerintah diharuskan melaksanakan progress untuk segera bertransformasi menuju *e-government* dengan pengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna penyederhanaan akses pada semua informasi maupun layanan publik yang disediakan pemerintah”. Oleh karena itu, elemen *stakeholder* mulai dari lingkup masyarakat, pelopor dunia bisnis, pihak jasa, dan juga pemangku kepentingan lainnya senantiasa bebas mempergunakan informasi serta layanan pemerintahan dengan efektif (Bahari & Frinaldi, 2023).

Adanya kemajuan teknologi pada bidang komunikasi berhasil mengubah pandangan terkait dominasi sepihak dalam proses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Melalui perkembangan tersebut, akhirnya terbuka ruang komunikasi dialogis di antara keduanya dimana terdapat pergeseran tata cara kerja pemerintah dengan memberdayakan manajemen informasi dan skema komunikasi.

Pengukuran suatu keberhasilan inovasi dapat dilihat apabila produk, jasa, proses, dan cara pelayanan yang diimplementasikan dapat menghasilkan perubahan konkret dalam bentuk terwujudnya efisiensi serta efektivitas dalam optimalnya suatu layanan (Pratama, 2020).

Sebagai bagian dari upaya modernisasi dan peningkatan pelayanan publik, banyak kota di Indonesia yang mulai mengimplementasikan sistem *e-government* untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah gambaran tentang kota-kota yang telah berhasil mengembangkan sistem

e-government sebagai bagian dari upaya mereka dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Berikut ini disajikan daftar tabel yang memuat indeks inovasi daerah untuk kota-kota di tahun 2023. Daftar ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai tingkat inovasi yang tercatat di masing-masing wilayah, yang dapat mencerminkan sejauh mana daerah-daerah tersebut berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Tabel 1.1 Indeks Inovasi Daerah Kota Tahun 2023

NO	PEMERINTAH DAERAH	SKOR INDEKS	PREDIKAT	NO	PEMERINTAH DAERAH	SKOR INDEKS	PREDIKAT
1.	Kota Mojokerto	84,46	Sangat Inovatif	50.	Kota Langsa	49,69	Inovatif
2.	Kota Mataram	76,17	Sangat Inovatif	51.	Kota Gorontalo	49,30	Inovatif
3.	Kota Bekasi	72,74	Sangat Inovatif	52.	Kota Bandung	49,14	Inovatif
4.	Kota Cimahi	70,99	Sangat Inovatif	53.	Kota Banjarbaru	48,36	Inovatif
5.	Kota Sawah Lunto	70,39	Sangat Inovatif	54.	Kota Jayapura	48,08	Inovatif
6.	Kota Bandar Lampung	70,33	Sangat Inovatif	55.	Kota Kediri	47,63	Inovatif
7.	Kota Makassar	70,15	Sangat Inovatif	56.	Kota Banjar	47,54	Inovatif
8.	Kota Bengkulu	69,46	Sangat Inovatif	57.	Kota Palangka Raya	47,30	Inovatif
9.	Kota Palembang	68,13	Sangat Inovatif	58.	Kota Kendari	47,06	Inovatif
10.	Kota Semarang	65,80	Sangat Inovatif	59.	Kota Manado	46,98	Inovatif
11.	Kota Sukabumi	65,74	Sangat Inovatif	60.	Kota Tasikmalaya	46,70	Inovatif
12.	Kota Pariaman	65,31	Sangat Inovatif	61.	Kota Malang	46,55	Inovatif
13.	Kota Probolinggo	64,01	Sangat Inovatif	62.	Kota Pasuruan	46,42	Inovatif
14.	Kota Padang Panjang	63,28	Sangat Inovatif	63.	Kota Medan	44,77	Inovatif
15.	Kota Pekanbaru	62,86	Sangat Inovatif	64.	Kota Tanjung Pinang	44,75	Inovatif
16.	Kota Jambi	62,36	Sangat Inovatif	65.	Kota Banda Aceh	44,58	Inovatif
17.	Kota Surabaya	61,41	Sangat Inovatif	66.	Kota Salatiga	44,55	Inovatif

18.	Kota Bima	61,30	Sangat Inovatif	67.	Kota Subussalam	44,51	Inovatif
19.	Kota Surakarta	61,27	Sangat Inovatif	68.	Kota Bukittinggi	44,51	Inovatif
20.	Kota Padang	61,17	Sangat Inovatif	69.	Kota Ternate	44,16	Inovatif
21.	Kota Banjarmasin	60,72	Sangat Inovatif	70.	Kota Sungai Penuh	43,60	Inovatif
22.	Kota Solok	60,46	Sangat Inovatif	71.	Kota Cirebon	42,96	Inovatif
23.	Kota Tangerang	60,39	Sangat Inovatif	72.	Kota Dumai	42,38	Inovatif
24.	Kota Yogyakarta	60,35	Sangat Inovatif	73.	Kota Binjai	42,04	Inovatif
25.	Kota Tangerang Slatn	60,15	Sangat Inovatif	74.	Kota Payakumbuh	41,47	Inovatif
26.	Kota Tegal	59,75	Inovatif	75.	Kota Gunungsitoli	40,34	Inovatif
27.	Kota Magelang	59,28	Inovatif	76.	Kota Padangsidimpuan	39,45	Inovatif
28.	Kota Samarinda	69,20	Inovatif	77.	Kota Cilegon	39,42	Inovatif
29.	Kota Denpasar	59,17	Inovatif	78.	Kota Balikpapan	39,14	Inovatif
30.	Kota Pare-pare	57,85	Inovatif	79.	Kota Pagar Alam	38,75	Inovatif
31.	Kota Pekalongan	57,84	Inovatif	80.	Kota Ambon	38,38	Inovatif
32.	Kota Pangkal Pinang	57,68	Inovatif	81.	Kota Tarakan	38,20	Inovatif
33.	Kota Bogor	56,82	Inovatif	82.	Kota Bau-bau	37,52	Inovatif
34.	Kota Tidore Kepulauan	56,01	Inovatif	83.	Kota Lhokseumawe	36,38	Inovatif
35.	Kota Palopo	55,92	Inovatif	84.	Kota Tomohon	34,71	Inovatif
36.	Kota Pontianak	55,81	Inovatif	85.	Kota Sabang	33,44	Inovatif
37.	Kota Bontang	54,83	Inovatif	86.	Kota Tanjung Balai	31,66	Inovatif
38.	Kota Metro	54,69	Inovatif	87.	Kota Pematang Siangtang	25,76	Inovatif
39.	Kota Bitung	55,22	Inovatif	88.	Kota Kupang	19,44	Inovatif
40.	Kota Lubuklinggau	54,09	Inovatif	89.	Kota Prabumulih	10,50	Inovatif
41.	Kota Serang	54,03	Inovatif	90.	Kota Tual	10,40	Inovatif
42.	Kota Batam	53,61	Inovatif	91.	Kota Tebing Tinggi	8,80	Inovatif
43.	Kota Singkawang	53,33	Inovatif	92.	Kota Sibolga	8,00	Inovatif
44.	Kota Madiun	52,62	Inovatif	93.	Kota Sorong	0,40	Inovatif
45.	Kota Kotamobagu	52,09	Inovatif				
46.	Kota Depok	51,12	Inovatif				
47.	Kota Pali	51,05	Inovatif				
48.	Kota Blitar	50,83	Inovatif				
49.	Kota Batu	49,78	Inovatif				

Sumber:ppid.kemendagri.go.id,2023

Tabel 1.1 menampilkan Indeks Inovasi Daerah Kota Tahun 2023. Di mana Kota Bekasi menduduki peringkat 3 dengan predikat sangat inovatif dalam indeks inovasi kota tahun 2023. Pemingkatan laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan temuan pengukuran indeks inovasi daerah ini merupakan data valid teraktual oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang pemerintahannya berupaya mengembangkan *e-government*. Mengkaji pertumbuhan penduduk yang bertempat tinggal di Kota Bekasi mencapai 2.627 juta jiwa, tentu masih banyak tantangan inovasi pelayanan public yang harus dihadirkan untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat. Capaian tata public digital Kota Bekasi pada tahun 2022 mencapai angka 2,78 yang kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 3,01. Berikut merupakan contoh beberapa aplikasi pada instansi:

Tabel 1.2 Aplikasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi

No	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengguna	Fungsi
1.	E-Sakip	SETDA	Aplikasi akuntabilitas kerja yang berguna memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja
2.	E-Open	DISDUKCAPIL	Aplikasi berbasis android yang berguna untuk mengurus layanan pendaftaran kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bekasi
3	WBS (wistle blowing system)	Inspektorat	Aplikasi pengaduan pelaporan masyarakat tentang dugaan adanya fraud
4.	SIM PKB	DISHUB	Aplikasi sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor

5.	OSS (Online Single Submission)	DISNAKER	Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik BKPM
6.	SIPJALU (Sistem informasi pengendalian pajak penerangan jalan umum)	DBMSDA	Aplikasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak PJU, mengevaluasi kinerja pengumpulan, dan mengidentifikasi area yang perlu perhatian lebih
7.	SIPINTAR	DISDIK	Aplikasi untuk sistem informasi untuk mengelola program Indonesia Pintar, yang memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik miskin atau rentan miskin.
8.	SIENCANG (Sistem perencanaan, Pembangunan, dan penganggaran)	BAPELITBANGDA	Apikasi sistem perencanaan, Pembangunan, dan penganggaran Kota Bekasi
9.	INLISite (integrated library information system)	DISARPUSDA	Aplikasi otomasi yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan data perpustakaan
10.	SISMIOP	BAPENDA	Aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak

Sumber: Bekasikota.go.id,2023

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi merupakan hasil penggabungan antara Dinas Kearsipan dan Dinas Perpustakaan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Disarpusda Kota Bekasi juga merupakan bagian dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Bekasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2019, LKD adalah perangkat daerah atau unsur pembantu Wali Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Adapun fungsi, tugas, dan tanggung jawab LKD menurut Peraturan Wali Kota tersebut antara lain meliputi pengelolaan arsip tetap, pengelolaan arsip yang sudah tidak aktif dengan ketentuan retensi minimal 10 tahun dari perangkat daerah dan BUMD, melakukan pembinaan terhadap pengelola arsip di daerah, serta mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan kearsipan di daerah. Selain itu, LKD juga bertanggung jawab dalam menyusun peraturan terkait pengelolaan arsip di daerah. Pengelolaan arsip yang dilakukan oleh Disarpusda Kota Bekasi telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012, yang mencakup berbagai kegiatan seperti pembuatan, pemanfaatan, perawatan, penyimpanan, dan depresiasi arsip. Dengan pengelolaan yang terstruktur ini, diharapkan arsip dapat terjaga dengan baik dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah Kota Bekasi sudah melakukan inovasi pelayanan public berbasis *e-government*, diantaranya sudah mengembangkan bahkan pernah mengembangkan aplikasi sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Sistem Informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Nama	Uraian	Keterangan
1.	SIMKAR	Pelayanan arsip inaktif dan statis	Non Aktif
2.	SRIKANDI	Pelayanan kearsipan dinamis	Proses Pengembangan
3.	SIKD	Pelayanan kearsipan dinamis	Di non aktifkan dari ANRI
4.	INSLite	Pelayanan informasi kepubstakaan	Aktif

Sumber: disarpusda.bekasikota.go.id, 2023

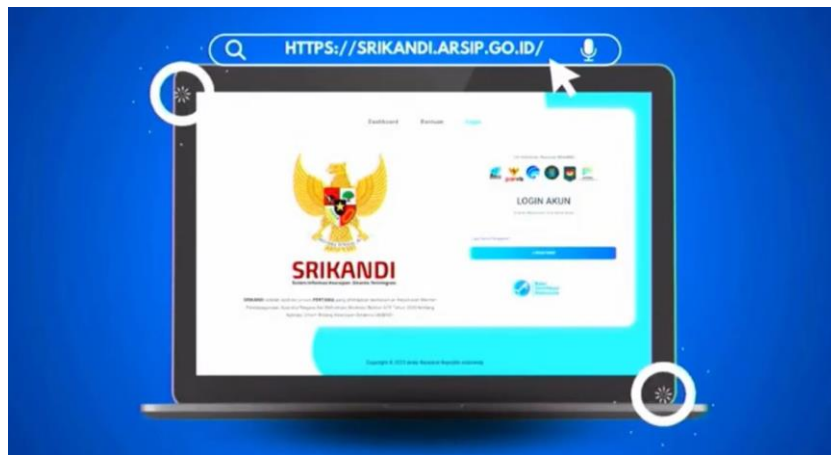
Ditinjau dari tabel tersebut, aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi dengan status proses pengembangan yang mengurus tentang kearsipan. Arsip dilihat sebagai pusat ingatan dan sumber informasi yang sudah terintegrasi dengan rapih dengan guna menunjang kelancaran kehidupan dan perkembangan organisasi. Dengan terbitnya pembaharuan sistem pengelolaan arsip menjadi arsip digital, sehingga meningkatkan kualitas manajemen kearsipan untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, disebutkan bahwa aplikasi Srikandi masih berstatus dalam tahap pengembangan. Aplikasi Srikandi dirancang untuk mempermudah pengelolaan arsip dan perpustakaan di Kota Bekasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun sedang dalam pengembangan, aplikasi ini telah digunakan secara terbatas untuk beberapa fungsi dasar, seperti pengelolaan data arsip dan peminjaman buku secara digital.

Namun, karena masih dalam tahap pengembangan, aplikasi Srikandi mungkin belum sepenuhnya optimal dalam hal fitur dan integrasi antar sistem. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk perbaikan dalam antarmuka pengguna, integrasi data arsip dengan platform lain, serta penguatan infrastruktur untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan aman. Organisasi perangkat daerah dan pegawai di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan aplikasi ini sehingga nantinya dapat mendukung pelayanan yang lebih baik.

Era disrupsi mendorong terus berkembangnya pengelolaan arsip digital, di mana aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) mengalami berbagai pembaruan. Salah satu faktor yang mendorong perubahan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengatur bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh instansi, lembaga, kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus bersifat umum dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efisien dan terhubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengeluarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SIKANDI). Peraturan ini bertujuan untuk menjadikan SRIKANDI sebagai aplikasi umum yang digunakan di bidang kearsipan, yang dapat mendukung pengelolaan arsip secara lebih terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan yang semakin berbasis elektronik. Dengan penerapan SRIKANDI, diharapkan pengelolaan arsip dapat lebih mudah diakses, lebih transparan, dan lebih terstandarisasi di seluruh instansi pemerintah.



Gambar 1.1 Tampilan Menu Login Pada SRIKANDI Versi 3

Sumber: Srikandi.arsip.go.id

SRIKANDI merupakan aplikasi kearsipan yang terhubung secara otomatis dan dirancang langsung oleh pemerintah dalam rangka mempermudah distribusi surat dan arsip elektronik. Srikandi diberdayakan sebagai metode pengelolaan aktivitas pengarsipan yang efisien dengan adanya kemudahan akses yang tangkas dan sederhana (Rahmah & Meirinawati, 2023).



Gambar 1.2 Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi Buka Workshop Aplikasi Srikandi

Sumber: Bekasikota.go.id, 2023

Pemerintah daerah kota Bekasi telah memulai pengelolaan surat secara elektronik dengan mengenalkan Aplikasi Srikandi sejak tahun 2022. Pada tahun 2023 pengenalan srikandi kepada kepala perangkat daerah dengan memfokuskan kepada admin perangkat daerah untuk berperan aktif menggunakan aplikasi srikandi dalam mengelola administrasi perkantoran dan sudah terlaksana *workshop* yang bertempat di Balai Patriot Kota Bekasi yang turut diikuti Aparatur Pemerintah sebagai peserta. Dengan dihadiri Ketua Tim Pembinaan Kearsipan dan Wilayah Barat II, Sri Wulandari dan Arsiparis Penyelia, Ulvina Haviza sebagai pembicara *workshop*. Sehingga bertujuan untuk memberikan pembekalan mulai dari teori maupun segi cara mengoperasikan sehingga bisa diaplikasikan setiap admin organisasi perangkat daerah secara praktis.



Gambar 1.3 Pembekalan dan Pendampingan Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI Eselon II

Sumber: Youtube Pemerintah Kota Bekasi, 2024

Keberlanjutan dari *money* aplikasi SRIKANDI kembali diadakan pembekalan dan pendampingan pengelolaan aplikasi SRIKANDI Eselon II yang terlaksana pada 11 September 2024 di Hotel Merapi Merbabu.



Gambar 1.4 Launching Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

Sumber: Youtube Pemerintah Kota Bekasi

Sehari selepasnya diresmikan pada 12 September 2024 launching Aplikasi SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI sebagai langkah transformasi kearsipan untuk memperkuat memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kearsipan, dan mengembangkan khazanah kearsipan Nusantara untuk penguatan memori kolektif bangsa.

Implementasi srikandi tahun 2024 lingkup kota Bekasi mempunyai dasar hukum diantaranya (a) Peraturan waikota Bekasi nomor 54 tahun 2023, (b) Keputusan walikota Bekasi nomor 000.5.3/kep.111-disarpusda/II/2024 tentang implementasi aplikasi Srikandi wilayah kota Bekasi, (c) Keputusan walikota Bekasi nomor 000.5.3/kep.224-disarpusda/V/2024 tentang tim implementasi sistem informasi dinamis terintegrasi srikandi di lingkungan pemerintah kota Bekasi, (d) Intruksi walikota Bekasi nomor 000.5.3/50/disarpusda.pik tentang pengalihan penggunaan aplikasi e-office ke aplikasi srikandi di cakupan wilayah pemerintah kota Bekasi.

Pengenalan aplikasi srikandi tahun 2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan telah mengimplementasikan kepada 44 admin perangkat daerah, sebanyak 44 pencatat surat dan sebanyak 1605 akun pengguna srikandi terdiri dari 37 eselon II, 181 eselon III, 561 eselon IV.

Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah Kota Bekasi didukung dengan adanya SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola kearsipan yang di dalamnya terbagi ke dalam fungsional arsiparis dan petugas pengelola kearsipan yang berada di bawah koordinasi Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip. Namun, kelemahan dari pengimplementasian Aplikasi SRIKANDI yakni dalam praktiknya pengaplikasian SRIKANDI masih belum merata pada taraf provinsi ataupun kabupaten/kota. Serta, *setting* aplikasi menyusahkan pengguna sehingga instansi khususnya di pemerintah daerah yang sebelumnya telah mengoperasikan aplikasi serupa, menolak untuk beralih ke SRIKANDI. Maka dari itu, dalam menganalisis inovasi Aplikasi SRIKANDI menggunakan karakteristik atau ciri khas dari inovasi. Karakteristik tersebut merupakan sifat dari inovasi dimana cepat atau lambatnya penerimaan inovasi luas dipengaruhi oleh karakteristik tersebut. Everett M. Rogers mengungkapkan lima karakteristik inovasi yang di antaranya terdapat keuntungan relative (*relative advantage*), kesesuaian (*compability*), kerumitan (*complexity*), kemungkinan dicoba (*triability*) dan kemudahan diamati (*observability*). Oleh sebab itu, penanganan permasalahan tersebut merupakan perwajahan dari praktik *e-government* di Pemerintah Kota Bekasi yang mana merepresentasikan konsep *smart city*.

Pemerintah daerah Kota Bekasi mengacu pada konsep *Smart City* untuk melakukan pemenuhan sistem ataupun birokrasinya agar lebih mumpuni. Selaras dengan visi “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan” dan misi pertama yang berbunyi, “Pemerintah daerah Kota Bekasi akan meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”, hal tersebut sudah berjalan, dengan melakukan pengembangan layanan publik berbasis IT yakni melalui salah satunya aplikasi SRIKANDI ini untuk pengelolaan arsip berbasis digital.

Mempertimbangkan terhadap kerumitan problematika permasalahan dalam optimalisasi *e-government* dan transformasi teknologi informasi di bidang pelayanan public, penelitian ini memiliki tingkat urgenitas untuk diteliti lebih dalam menganalisis untuk mengatasi permasalahan terkait pergeseran digitalisasi di bidang pelayanan publik. Dalam pengentasan dari permasalahan internal diatas, penulis berusaha mengkaji dan meneliti tentang karakteristik inovasi pengelolaan aplikasi SRIKANDI pada Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah Kota Bekasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan inovasi layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan responsif, terutama dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kota Tahun 2023, meskipun beberapa kota seperti Bekasi telah dianggap sangat inovatif, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi teknologi yang optimal. Sehingga mempertanyakan apakah karakteristik inovasi menjadi penyebab terhadap tidak optimalnya inovasi Aplikasi SRIKANDI?

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat penjabaran dari latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Pergantian aplikasi *versi 1* ke *versi 3* yang mana pada *versi 1*, fitur-fitur yang tersedia masih terbatas pada penyimpanan dan penelusuran arsip sederhana. Dengan peningkatan ke *versi 2*, aplikasi mulai menawarkan fitur yang lebih interaktif seperti kolaborasi antar pengguna dalam pengelolaan arsip. Saat ini, *versi 3* telah menghadirkan pembaruan signifikan dengan integrasi layanan lintas *platform* dan keamanan data yang lebih canggih.
- 2) Organisasi perangkat daerah Kota Bekasi belum semua mengoptimalkan menggunakan Aplikasi SRIKANDI
- 3) *Setting* tampilan aplikasi yang dirasa sulit untuk digunakan yang mana tampilan *interface* aplikasi SRIKANDI versi terbaru dinilai oleh sebagian pengguna sebagai kurang intuitif dan sulit digunakan.

Setelah tindak lanjut peninjauan dari identifikasi masalah, terdapat rumusan yang bisa diambil yaitu:

- 1) Bagaimana pergantian Aplikasi SRIKANDI dari versi 1 ke versi 3 terhadap kinerja penggunaan dan kepuasan pengguna di organisasi pemerintah daerah Kota Bekasi dengan memperhatikan karakteristik inovasi?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat disimpulkan dalam kajian yang didapat dari rumusan masalah, yaitu:

- 1) Untuk menganalisis karakteristik inovasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
- 2) Untuk menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan *output* yang dapat diberikan dapat ditilik dalam kegunaan akademis maupun kegunaan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai inovasi pelayanan publik menggunakan perkembangan elektronik yang dilihat berdasarkan karakteristik inovasi pada aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi. Dan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai media refrensi untuk pengembangan keberlanjutan menggunakan konsep teori karakteristik inovasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi untuk melihat perkembangan aplikasi sistem

informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI). Penelitian tersebut digunakan untuk menilai pelayanan publik yang sedang dikembangkan guna mengefisienkan kinerja pegawai dan kepraktisan penggunaan elektronik.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat basis penelitian, peneliti menggunakan 10 jurnal diantaranya 2 jurnal internasional dan 8 jurnal nasional yang mana hal ini membantu penulis dalam meneliti Karakteristik Inovasi Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (Srikandi) Pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi serta mengetahui penelitian-penelitian yang sudah dibuat sebelum penelitian ini dimulai.

Jurnal pertama yang ditulis oleh Iin Khoirunnisa pada tahun 2023 dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi RAGEM (*Religius, Adaptable, Great, Educate, Modern*) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang” yang memiliki tujuan untuk melakukan analisis dalam praktik aplikasi RAGEM tersebut dengan berpatokan pada ciri khas inovasi dan menjabarkan apa saja yang menjadi penghambat ataupun pendorong inovasi bagi aplikasi tersebut. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa RAGEM hadir untuk mempermudah serta mengintegrasikan berbagai macam aplikasi layanan informasi terdahulu. Aplikasi “RAGEM” telah memberikan manfaat dan kepuasan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Serang (Khoirunnisa et al., n.d.).

Sementara itu, persamaan penelitian antara penelitian ini dan penelitian Iin Khoirunnisa pada tahun 2023 terletak pada penggunaan teori karakteristik inovasi menurut Everett M. Rogers dan melihat faktor penghambat dan faktor pendorong menurut Fontana. Serta perbedaan dengan penelitian peneliti ialah peneliti menggunakan lokus di Kota Bekasi dan berfokus pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam pengelolaan Aplikasi SRIKANDI.

Jurnal kedua oleh Anastacia Sherren Syah Putri Noor, Fenny Damayanti dan Agus Garnida yang berjudul “Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Komunikasi Tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat”, bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik aplikasi SRIKANDI sebagai upaya peningkatan efisiensi komunikasi tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Dengan hasil dari penelitian ini yaitu Penggunaan aplikasi SRIKANDI berjalan dengan lancar, karena memudahkan aktivitas surat-menyurat, seperti penerimaan secara real-time dan membantu instansi dalam memantau arsip, surat, serta dokumen dengan lebih teratur tanpa perlu membuka catatan manual. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan berbagai keunggulan, seperti manajemen surat masuk-keluar di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat (Noor et al., 2023).

Persamaan antara penelitian peneliti dan penelitian oleh Anastacia Sherren Syah Putri Noor, Fenny Damayanti, dan Agus Garnida terletak pada fokus yang sama terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI, yang dalam kedua penelitian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja di institusi pemerintah. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti manfaat aplikasi ini dalam mempermudah pengelolaan arsip dan surat-menyurat secara *real-time*. Namun, perbedaan utama

terletak pada konteks institusi yang diteliti, di mana penelitian peneliti berfokus pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dengan analisis karakteristik inovasi serta faktor pendorong dan penghambat penerapannya, sedangkan penelitian mereka lebih menekankan pada peningkatan komunikasi tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat.

Jurnal ketiga yang ditulis oleh Alfenia Sinta Devina, Moh. Safii, Adi Prasetyawan dan Asmadi Mohammed Ghazali yang dipublikasi pada tahun 2024 dengan judul “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batu” yang mana untuk mengetahui penilaian terhadap sistem yang dapat dilakukan dengan cara evaluasi serta melakukan evaluasi terhadap aplikasi Srikandi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Dan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu praktik dari aplikasi Srikandi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu tergolong baik. Penelitian menunjukkan bahwa variabel *relative advantage* memperoleh skor tertinggi dengan rata-rata 4,45, yang dikategorikan sangat baik. Ini mengindikasikan bahwa aplikasi Srikandi memiliki keunggulan lebih dibandingkan sistem sebelumnya. Variabel *compatibility* memperoleh skor 4,15 dengan kategori sangat baik, sementara variabel *complexity* memiliki skor rata-rata 4,05 yang tergolong baik, tetapi menjadi variabel dengan skor terendah dibandingkan lainnya. Variabel *Attitude Toward Using* (ATU) mendapat rata-rata 4,21, dikategorikan sangat baik, dan Behavioural Intention memperoleh rata-rata 4,14, termasuk kategori baik, yang menunjukkan bahwa pengguna berminat

memanfaatkan aplikasi Srikandi untuk menyelesaikan tugas mereka (Devina et al., 2024).

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Alfenia Sinta Devina, Moh. Safii, Adi Prasetyawan, dan Asmadi Mohammed Ghazali terletak pada fokus utama yang sama, yaitu evaluasi dan analisis penggunaan aplikasi Srikandi. Kedua penelitian ini memiliki tujuan dalam hal menilai kinerja serta penerapan aplikasi Srikandi dalam konteks organisasi pemerintah, meskipun penelitian peneliti lebih menekankan pada karakteristik inovasi berdasarkan teori *Diffusion of Innovations* oleh Rogers, sementara penelitian mereka lebih berfokus pada evaluasi kinerja melalui variabel-variabel seperti *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, dan *attitude toward using* (ATU). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian mereka dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, sedangkan penelitian peneliti dilakukan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Jurnal keempat adalah “Pengelolaan Arsip Berbasis Digital Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika” yang ditulis oleh Yulia Nurul Aini dan di publikasi pada tahun 2023 dengan tujuan ingin mencari tahu tentang pengaplikasian dan apa saja yang berpengaruh dalam pengaplikasian Srikandi tersebut dengan berpacu pada teori inovasi dari M. Rogers Ditemukan bahwa pemanfaatan aplikasi Srikandi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih kurang optimal. Pernyataan tersebut dilihat dari indikator inovasi menurut Rogers (2003), yang mencakup keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan,

kemungkinan untuk diuji coba, dan kemudahan untuk diamati. Beberapa faktor penghambat penerapan aplikasi ini antara lain adalah belum semua unit kerja menggunakannya, sehingga proses persuratan dan kearsipan belum terintegrasi, adanya kendala jaringan yang membuat server Srikandi sulit diakses, serta kurangnya dukungan dari pimpinan dalam mengimplementasikan aplikasi ini (Aini, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Nurul Aini mengenai “Penerapan Aplikasi Srikandi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)” mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama menggunakan teori *Diffusion of Innovations* oleh Rogers untuk menganalisis implementasi aplikasi Srikandi. Keduanya juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi ini. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian peneliti berfokus pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, sementara penelitian Aini berfokus pada BMKG. Selain itu, hasil yang ditemukan juga berbeda, di mana pada penelitian Aini, penerapan aplikasi Srikandi belum optimal karena beberapa unit kerja belum terintegrasi dan terdapat kendala teknis, sedangkan penelitian peneliti akan mengeksplorasi lebih lanjut faktor pendorong dan penghambat di cakupan wilayah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Jurnal penelitian kelima ini ditulis oleh Ayang Adra dan Iip Permana dengan judul “Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi” yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan Aplikasi Srikandi bagi pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya

Manusia Regional Bukittinggi. Dan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kehadiran aplikasi Srikandi di kantor PPSDM Regional Bukittinggi menunjukkan variasi dalam tingkat pemanfaatan berdasarkan beberapa faktor. Dari segi harapan kinerja, meskipun aplikasi ini memudahkan tugas administrasi, praktik pemanfaatannya masih sedikit disebabkan minimnya pemberitahuan (*notifications*) yang menjadi hambatan dalam kerja sama yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan, sehingga pembaruan diperlukan. Namun, berdasarkan harapan usaha, aplikasi ini dinilai memuaskan karena mudah dipelajari dan digunakan dengan interaksi yang jelas. Dari perspektif pengaruh sosial, dukungan dari rekan kerja dan atasan cukup baik, namun peningkatan keterampilan pegawai melalui seminar atau pelatihan masih diperlukan. Meski pegawai memiliki wawasan dan penguasaan IPTEK yang fasih yang didukung dengan kompatibelnya perangkat yang tersedia, penggunaan aplikasi ini belum optimal karena keterbatasan teknis seperti kebutuhan perangkat pendukung dan koneksi internet yang stabil. Dalam hal standarisasi, meskipun aplikasi ini bermanfaat untuk tugas administrasi dan pengarsipan, pegawai masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk bisa menggunakan aplikasi secara efektif (Adra & Permana, 2023).

Pada penelitian ini ditemukan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayang Adra dan Iip Permana dalam hal fokus pada aplikasi Srikandi, di mana keduanya mengeksplorasi pemanfaatan aplikasi tersebut di lingkungan pemerintahan. Persamaan lainnya terletak pada analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi, seperti dukungan dari rekan kerja, kemudahan penggunaan, dan keterbatasan teknis yang dihadapi. Namun, perbedaan utama adalah konteks

dan tujuan penelitian. Penelitian Adra dan Permana berfokus pada tingkat pemanfaatan aplikasi Srikandi oleh pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pada karakteristik inovasi dalam pengelolaan aplikasi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, serta faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi penerapannya.

Jurnal penelitian keenam oleh Indah Azzahra, Natalia dan Nur Ilman dengan judul “Studi Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Pemerintah Kota Palopo” untuk memahami kepuasan pengguna Aplikasi Sistem Informasi Srikandi dimana dilakukan pengukuran terkait puas atau tidaknya mereka yang menggunakan aplikasi tersebut sekaligus apa yang dipahami khususnya tentang efektivitas penggunaan aplikasi srikandi dengan diambilnya sampel pengguna Srikandi yang bertugas di lingkup pemerintah kota Palopo sebanyak 20 orang responden. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan penggunaan aplikasi SRIKANDI berjalan dengan baik, karena dapat memperlancar kegiatan surat menyurat dan memudahkan instansi dalam memonitor arsip, surat dan dokumen lebih rapi tanpa harus membuka catatan manual, kelebihan lainnya baik untuk surat masuk maupun surat keluar pada instansi-intansi pemerintahan kota palopo. Indikator aplikasi sudah baik, dilihat dari kemudahan penggunaan dan kegunaan aplikasi (Azzahra, Natalia , & Ilman, 2024).

Penelitian oleh Indah Azzahra, Natalia, dan Nur Ilman dengan judul “Studi Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Pemerintah Kota Palopo” berfokus pada kepuasan pengguna aplikasi

SRIKANDI, dengan indikator kemudahan penggunaan dan kegunaan aplikasi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan pengukuran kepuasan melalui responden yang merupakan pengguna aplikasi di lingkup pemerintah Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI membantu memperlancar kegiatan surat-menyurat dan mengelola arsip secara lebih efisien. Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada kajian terkait aplikasi SRIKANDI dan fokus pada implementasi di sektor pemerintahan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian peneliti yang menganalisis karakteristik inovasi dan faktor-faktor pendorong serta penghambat, sementara penelitian Azzahra lebih menitikberatkan pada kepuasan pengguna dan efektivitas penggunaan aplikasi dalam konteks operasional.

Jurnal penelitian ketujuh yang dibuat oleh Harvi Dasnoer, Aldri Frinaldi dan Lince Magriasti dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang” dengan tujuan dilakukannya analisis mengenai kebijakan tersebut yang merupakan sebuah usaha yang dilakukan agar terjadi peningkatan efisiensi dan upaya dalam meningkatkan efektivitas dan akselerasi *good governance* melalui penggunaan aplikasi Srikandi di Kecamatan Padang Utara. Hal tersebut nyatanya belum terlaksana dengan baik dengan melihat pada indikator implementasi yang belum dipenuhi sepenuhnya. Di sisi lain, aplikasi ini memberikan manfaat yang berarti untuk alur administrasi persuratan di lingkungan internal Pemerintah Kota Padang, seperti hilangnya penggunaan kertas (*paperless*), hingga efisiensi waktu dalam hal pendistribusiannya (Dasnoer et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Harvi Dasnoer, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang” mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu turut mengkaji penerapan aplikasi SRIKANDI dalam konteks pemerintahan daerah. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, perbedaannya terletak di fokus penelitian yang mana lebih menekankan pada implementasi kebijakan di tingkat kecamatan dengan hasil bahwa penerapan belum berjalan optimal, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis karakteristik inovasi dan faktor penghambat serta pendorong aplikasi SRIKANDI di tingkat dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Jurnal penelitian kedelapan oleh Krisna Marta Bahari dan Aldri Frinaldi pada tahun 2023 dengan judul “Inovasi Pengolahan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi SRIKANDI Di Kabupaten Solok” yang mana pada penelitian ini Krisna dan Aldri bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa optimal penggunaan aplikasi tersebut Kabupaten Solok. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI merupakan solusi dalam merangkum kegiatan Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Solok. Melalui aplikasi ini, pengelolaan arsip dinamis yang efisien dari berbagai segi. Namun, karena beberapa kendala, masih ada SKPD yang menggunakan metode manual dalam pengelolaan kearsipan, sehingga terjadi tumpang tindih dalam proses pengelolaan arsip di Kabupaten Solok (Bahari & Frinaldi, 2023)

Penelitian Krisna Marta Bahari dan Aldri Frinaldi tahun 2023 tentang “Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Solok”, tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan efektivitas aplikasi tersebut dalam mengelola arsip dinamis. Sementara itu, penelitian peneliti di Bekasi fokus pada karakteristik inovasi dari aplikasi SRIKANDI menggunakan teori *Diffusion of Innovations* oleh Rogers, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Persamaannya terletak pada penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai solusi pengelolaan arsip dinamis, tetapi perbedaannya adalah penelitian peneliti menekankan pada analisis karakteristik inovasi serta faktor penghambat dan pendorong, sedangkan penelitian Krisna dan Aldri berfokus pada deskripsi efektivitas aplikasi.

Jurnal internasional pertama yang digunakan adalah *Theory in Nursing Informatics Column* oleh June Kaminski dengan tujuan penerapan teori *Diffusion of Innovations* dalam konteks keperawatan, serta menjelaskan bagaimana teori ini dapat memandu inovasi teknologi dalam praktik, pendidikan, dan penelitian keperawatan. Dan dengan hasil menunjukkan bahwa pemahaman tentang proses difusi inovasi dan peran komunikasi serta jaringan peer sangat penting untuk keberhasilan adopsi inovasi dalam bidang keperawatan. Teori ini membantu dalam merumuskan strategi untuk mengimplementasikan perubahan inovatif secara efektif (Kaminski, 2011).

Jurnal "*Theory in Nursing Informatics Column*" oleh June Kaminski, teori *Diffusion of Innovations* digunakan untuk menganalisis penerapan inovasi teknologi dalam konteks keperawatan, dengan fokus pada bagaimana teori ini memandu inovasi dalam praktik, pendidikan, dan penelitian keperawatan.

Persamaannya dengan penelitian peneliti terletak pada penggunaan teori *Diffusion of Innovations* oleh Rogers untuk menganalisis karakteristik inovasi dan adopsi teknologi, yang dalam penelitian peneliti diterapkan pada pengelolaan aplikasi SRIKANDI di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Perbedaannya adalah konteks penelitian, di mana Kaminski fokus pada bidang keperawatan, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada sistem manajemen arsip dinamis di lingkungan pemerintahan. Selain itu, jurnal Kaminski lebih menekankan peran komunikasi dan jaringan peer dalam keberhasilan adopsi, sementara penelitian peneliti menitikberatkan pada faktor penghambat dan pendorong implementasi teknologi.

Jurnal internasional yang terakhir adalah “*Detailed Review Of Rogers’ Diffusion Of Innovations Theory And Educational Technology-Related Studies Based On Rogers’ Theory*” yang ditulis oleh Ismail Sahin pada tahun 2006 dengan tujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teori *Diffusion of Innovations* dalam promosi kesehatan di masyarakat. Ditemukan bahwa, aspek-aspek seperti dukungan sosial, kepercayaan pada inovasi, dan keterlibatan komunitas sangat berpengaruh pada keberhasilan adopsi inovasi kesehatan di masyarakat (Sahin, 2020).

Penelitian peneliti yang berjudul “Karakteristik Inovasi Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (Srikandi) Pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi”, peneliti menggunakan teori *Diffusion of Innovations* oleh Rogers untuk menganalisis karakteristik inovasi serta faktor penghambat dan pendorong penerapan sistem informasi kearsipan dinamis

terintegrasi (SRIKANDI). Di sisi lain, jurnal internasional yang dibahas sebelumnya mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teori tersebut dalam konteks promosi kesehatan di masyarakat. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada penggunaan teori *Diffusion of Innovations* sebagai kerangka analisis untuk memahami adopsi inovasi dalam konteks yang berbeda. Namun, diferensiasi penelitiannya ada di fokus penelitian, dimana penelitian SRIKANDI lebih berorientasi terhadap sistem informasi kearsipan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di instansi pemerintah, sementara penelitian Sahin lebih menekankan pada adopsi inovasi kesehatan di masyarakat serta faktor-faktor sosial yang berkontribusi dalam keberhasilan tersebut.

Tabel 1.4 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/ TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN DAN TEORI YANG DIGUNAKAN	METODE	HASIL
1.	Khoirunnisa, I., Yuningsih, T., & Djumiarti, T. (2023). Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi “RAGEM”(Religi us, Adaptable, Great, Educate, Modern) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 13(1), 1-21.	Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi “RAGEM” yang mengacu pada karakteristik inovasi dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendorong. Dengan menggunakan teori karakteristik inovasi pelayanan menurut Everett M. Rogers	Penelitian yang dipilih yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi “RAGEM” (Religi us, Adaptable, Great, Educated, Modern) ini adalah untuk memudahkan dan menyatukan semua jenis aplikasi layanan informasi yang telah dibuat sebelumnya. Aplikasi “RAGEM” memberikan nilai lebih, manfaat, dan kepuasan bagi pemerintah dan

		yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemudahan diamati, dan kemungkinan dicoba. Sedangkan dalam melihat faktor penghambat dan faktor pendorong dilihat dari faktor organisasi, faktor budaya, dan faktor manusia menurut Fontana.		masyarakat Kota Serang.
2.	Anastacia Sherren Syah Putri Noor, Fenny Damayanti dan Agus Garnida. (2023). Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Komunikasi Tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat. <i>Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi</i> . 22 (2). Hlm. 215-226	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan efektivitas komunikasi tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penggunaan aplikasi SRIKANDI berjalan dengan lancar, karena memudahkan aktivitas surat-menyerut, seperti penerimaan secara real-time dan membantu instansi dalam memantau arsip, surat, serta dokumen dengan lebih teratur tanpa perlu membuka catatan manual. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan berbagai keunggulan, baik dalam pengelolaan surat masuk maupun surat keluar di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat.
3.	Alfenia Sinta Devina, Moh. Safii, Adi Prasetyawan dan Asmadi Mohammed	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penilaian terhadap sistem yang dapat dilakukan dengan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Srikandi di Dinas Perpustakaan dan

	Ghazali. (2024). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batu. <i>Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi</i>. 8 (1) hlm. 220-237	cara evaluasi serta melakukan evaluasi terhadap aplikasi Srikandi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan model Difusi Inovasi dan TAM (Technology Acceptance Model) menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang telah dikembangkan oleh (Mkhize et al., 2016) yang menggunakan 5 variabel variabel dalam melakukan evaluasi sistem informasi yaitu, Relative Advantage, Compatibility, complexity, Attitude Toward Using, dan Behavioural Intention.	kuantitatif deskriptif	Kearsipan Kota Batu tergolong baik. Penelitian menunjukkan bahwa variabel relative advantage memperoleh skor tertinggi dengan rata-rata 4,45, yang dikategorikan sangat baik. Ini mengindikasikan bahwa aplikasi Srikandi memiliki keunggulan lebih dibandingkan sistem sebelumnya. Variabel compatibility memperoleh skor 4,15 dengan kategori sangat baik, sementara variabel complexity memiliki skor rata-rata 4,05 yang tergolong baik, tetapi menjadi variabel dengan skor terendah dibandingkan lainnya. Variabel Attitude Toward Using (ATU) mendapat rata-rata 4,21, dikategorikan sangat baik, dan Behavioural Intention memperoleh rata-rata 4,14, termasuk kategori baik, yang menunjukkan bahwa pengguna berminat memanfaatkan aplikasi Srikandi
--	--	--	-------------------------------	--

				untuk menyelesaikan tugas mereka.
4.	Yulia Nurul Aini. (2023). Pengelolaan Arsip Berbasis Digital Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. <i>Konfrensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0</i> . Hlm. 84-88	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan factor yang mempengaruhi penerapan Srikandi menggunakan teori inovasi dari Rogers yang didalamnya terdapat 5 indikator yang meliputi <i>relative advantage</i> /keuntungan relative, <i>compability</i> /kesesuaian, <i>complexity</i> /kerumitan, <i>triability</i> /kemungkinan dicoba, dan <i>observability</i> /kemudahan diamati.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Srikandi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari indikator inovasi menurut Rogers (2003), yang mencakup keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan untuk diuji coba, dan kemudahan untuk diamati. Beberapa faktor penghambat penerapan aplikasi ini antara lain adalah belum semua unit kerja menggunakannya, sehingga proses persuratan dan kearsipan belum terintegrasi, adanya kendala jaringan yang membuat server Srikandi sulit diakses, serta kurangnya dukungan dari pimpinan dalam mengimplementasikan aplikasi ini.
5.	Ayang Adra dan Iip Permana. 2023.	Penelitian ini bertujuan untuk	Penelitian ini	Penggunaan aplikasi Srikandi di kantor

	Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. <i>Jurnal Ilmu Administrasi Negara</i>. 11 (1). Hlm. 1-12	mengetahui pemanfaatan Aplikasi Srikandi bagi pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. Dimana mendeskripsikan tingkat pemanfaatan dan penggunaan aplikasi Srikandi berdasarkan variabel Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Standardization, solution dan memberikan rekomendasi.	menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif	PPSDM Regional Bukittinggi menunjukkan variasi dalam tingkat pemanfaatan berdasarkan beberapa faktor. Dari segi harapan kinerja, meskipun aplikasi ini memudahkan tugas administrasi, penggunaannya masih rendah karena kurangnya notifikasi yang menghambat koordinasi antara pegawai dan pimpinan, sehingga pembaruan diperlukan. Namun, berdasarkan harapan usaha, aplikasi ini dinilai memuaskan karena mudah dipelajari dan digunakan dengan interaksi yang jelas. Dari perspektif pengaruh sosial, dukungan dari rekan kerja dan atasan cukup baik, namun peningkatan keterampilan pegawai melalui seminar atau pelatihan masih diperlukan. Meski pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta perangkat yang kompatibel, penggunaan aplikasi
--	---	--	---	--

				ini belum optimal karena keterbatasan teknis seperti kebutuhan perangkat pendukung dan koneksi internet yang stabil. Dalam hal standardisasi, meskipun aplikasi ini bermanfaat untuk tugas administrasi dan pengarsipan, pegawai masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk bisa menggunakan aplikasi secara efektif.
6.	Indah Azzahra, Natalia dan Nur Ilman. (2024). Studi Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Pemerintah Kota Palopo. <i>Jurnal Ilmu Pengetahuan</i>. 4 (4). Hlm. 171-177	Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kepuasan pengguna Aplikasi Sistem Informasi Srikandi dimana dilakukan pengukuran kepuasan pengguna aplikasi srikan pemahaman mereka khususnya kemudahan dalam penggunaan aplikasi srikandi, dimana dilakukan pengambilan sampel pengguna Srikandi yang bertugas di lingkup pemerintah kota Palopo yang melibatkan 20 orang responden	Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan aplikasi SRIKANDI berjalan dengan baik, karena dapat memperlancar kegiatan surat menyurat dan memudahkan instansi dalam memonitor arsip, surat dan dokumen lebih rapi tanpa harus membuka catatan manual, kelebihan lainnya baik untuk surat masuk maupun surat keluar pada instansi pemerintahan kota palopo. Indikator aplikasi sudah baik, dilihat dari kemudahan

				penggunaan dan kegunaan aplikasi.
7.	Harvi Dasnoer, Aldri Frinaldi dan Lince Magriasti. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i>. 9 (16), hlm. 319-324	Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Srikandi ini di lingkungan Kota Padang, sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas dan percepatan <i>good governance</i>. Menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III sebagai alat analisis, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan aplikasi Srikandi di Kecamatan Padang Utara telah dilaksanakan namun belum terimplementasikan dengan baik ditandai dengan belum terpenuhinya dengan baik indikator implementasi. Aplikasi Srikandi sangat membantu dalam proses administrasi persuratan di lingkungan internal Pemerintah Kota Padang, mulai dari tidak adanya lagi kertas / paperless, hingga kecepatan waktu dalam pengiriman surat antar instansi pemerintah
8.	Krisna Marta Bahari dan Aldri Frinaldi. (2023). Inovasi Pengolahan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi SRIKANDI Di Kabupaten Solok. <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah</i>. 8 (2) Hlm. 874-879.	Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa efektif Aplikasi SRIKANDI bisa dilaksanakan di Kabupaten Solok.	Penelitian yang dipilih yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Aplikasi SRIKANDI merupakan solusi untuk merangkum kegiatan Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Solok. Melalui aplikasi ini, pengelolaan arsip dinamis dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Namun, karena beberapa kendala,

				masih ada SKPD yang menggunakan metode manual dalam pengelolaan kearsipan, sehingga terjadi tumpang tindih dalam proses pengelolaan arsip di Kabupaten Solok.
9.	June Kaminski. (2011). Theory in Nursing Informatics Column. (Kaminski, Theory in Nursing Informatics Column, 2011). 6 (6), Hlm. 1-7	Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan teori Diffusion of Innovations dalam konteks keperawatan, serta menjelaskan bagaimana teori ini dapat memandu inovasi teknologi dalam praktik, pendidikan, dan penelitian keperawatan.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang proses difusi inovasi dan peran komunikasi serta jaringan peer sangat penting untuk keberhasilan adopsi inovasi dalam bidang keperawatan. Teori ini membantu dalam merumuskan strategi untuk mengimplementasikan perubahan inovatif secara efektif.
10.	Ismail Sahin. (2006). Detailed Review Of Rogers' Diffusion Of Innovations Theory And Educational Technology-Related Studies Based On Rogers' Theory. <i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i> . 5 (2).	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teori Diffusion of Innovations dalam promosi kesehatan di masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti dukungan sosial, kepercayaan pada inovasi, dan keterlibatan komunitas sangat berpengaruh pada keberhasilan adopsi inovasi kesehatan di masyarakat.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1988:29-30), merupakan metode pengelolaan dan pengoordinasian sumber daya dan personel publik dalam rangka merumuskan, melaksanakan, dan mengatur keputusan-keputusan yang diperlukan dalam kebijakan publik. Administrasi publik memiliki tujuan untuk menyelesaikan problematika di ranah publik dengan memperbaiki dan menyempurnakan organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Sedangkan McCurdy (1986) melihat administrasi publik sebagai suatu mekanisme politik dimana yakni cara mengintruksikan negara dan atau prinsip yang dipahami untuk melakukan berbagai fungsi negara. Sehingga administrasi publik tidak melihat persoalan manajerial saja, namun melihat pula persoalan politik. Maka, istilah untuk administrasi disebut dengan birokrasi (Kettl, 1993). Istilah tersebut menjadi lebih diucapkan sebab kemudahan kata untuk dicerna, dipahami, dan diawasi secara langsung oleh khalayak umum. Variasi makna ini berdasar pula dengan arti dari "publik" itu sendiri. "Publik" sering dipahami sebagai masyarakat luas. Namun, "publik" juga merujuk kepada orang atau pihak yang mengabdikan diri demi kepentingan Masyarakat luas tersebut yang akhirnya disebut dengan "lembaga pemerintah".

Administrasi publik diterjemahkan sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik. Adapun mengartikannya dengan *administration for public* atau adminisrasi untuk public. Lebih dari itu,

terdapat paradigma terkait *administration by public* atau administrasi oleh publik. Istilah *administration of public* memperlihatkan sejauh mana peran pemerintah selaku satu-satunya agen yang memiliki kekuasaan yang nantinya membuat regulasi secara aktif dan berinovatif dalam mengelola atau menentukan langkah yang harus diambil serta prakarsa, dimana hal tersebut memiliki urgensi bagi masyarakat yang diasumsikan sebagai pihak pasif, kurang mampu, dan tunduk oleh apa yang diputuskan pemerintah.

Lalu, istilah *administration for public* memperlihatkan gambaran yang lebih baik dimana peran pemerintah adalah memberikan pelayanan publik (*service provider*). Digambarkan bahwa pemerintah lebih tanggap mengenai apa yang dibutuhkan warganya serta apa cara mana yang terbaik dalam penyediaan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya, *administration by public* adalah istilah yang berpusat pada diberdayakannya masyarakat agar menjadi mandiri dan kompeten. Maka dari itu, pemerintah melakukan pengadaan berupa fasilitasi masyarakat untuk mengelola kehidupannya yang sekaligus melepaskan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan cara untuk melihat sebuah nilai, metode, prinsip dasar, atau solusi dari problematika yang dihadapi masyarakat dalam jangka waktu tertentu (Kuhn, 1970). Nicholas Henry turut mengatakan standar dari disiplin ilmu mencakup lokus dan fokus. Henry mengutarakan bahwa ada 5 pandangan dalam administrasi negara, yaitu:

1) Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Goodnow (1900) melalui karyanya, *"Politics and Administration"* telah menyampaikan tentang fokus perhatian politik pada regulasi sebagai ungkapan dari keinginan rakyat, sementara administrasi memusatkan pada praktik dari regulasi atau keinginan tersebut. Dipisahkannya politik dan administrasi memanifestasikan untuk pemisahan kekuasaan yang bertanggung jawab untuk mengekspresikan keinginan rakyat, yang mana terdapat badan eksekutif untuk mewujudkan keinginan tersebut. Badan yudikatif juga membantu legislatif untuk penetapan tujuan serta perumusan regulasinya sehingga paradigma terhadap administrasi menjadikannya sebagai sesuatu yang bebas nilai, serta diarahkan agar mampu meraih birokrasi yang efisien dan ekonomi birokrasi pemerintah. Namun, pandangan tersebut memberi penekanan untuk dimensi "*locus*" yaitu birokrasi pemerintah, tetapi tidak dibahas jelas tentang prioritas atau cara mana yang nantinya berkembang di administrasi publik.

2) Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip administrasi adalah fokus dari administrasi publik itu sendiri. Prinsip tersebut dituangkan pada POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Paradigma ini sifatnya umum yang bisa dipalikasikan dimanapun. Tidak pernah diungkapkan secara jelas mengenai lokus

administrasi publik tersebut karena bisa dipalikasikan dimanapun termasuk dalam instansi pemerintah.

3) Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Menurut Herbert Simon Prinsip Manajemen Ilmiah POSDCORB tidak memberikan penjelasan mengenai arti “*Public*” dari “*public Administration*”. Kritik tersebut membuka perdebatan Dikotomi Administrasi dan Politik. Sehingga lahir pandangan lain dimana administrasi publik dianggap menjadi studi dengan locus pada birokrasi pemerintah, tetapi fokusnya tidak begitu jelas disebabkan banyak kelemahan di dalam prinsip-prinsip administrasi publik tersebut.

4) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi

Prinsip manajemen yang sebelumnya populer, kini dikembangkan dalam paradigma ini yang mana lebih ilmiah dan mendalam. Fokus dari paradigma ini adalah aktivitas organisasi, manajemen analisis, dan penggunaan teknologi. Sehingga perkembangan terjadi dalam dua arah di antaranya berpusat untuk perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berpusat untuk kebijakan publik. Asumsi dari perkembangan berbagai fokus yang ada adalah fokus tersebut mampu diaplikasikan tidak hanya pada wilayah bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Oleh karena demikian, tidak adanya kejelasan terkait locus.

5) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik merupakan pandangan yang terakhir. Paradigma ini lebih mempunyai kejelasan tentang fokus dan lokus. Teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik adalah fokusnya, sementara problematika dan kepentingan publik adalah lokusnya.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik bertanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan mengenai sistem administrasi serta teknik-teknik pengelolaan yang akan diterapkan di sektor publik dan organisasi non-profit. Asal-usul manajemen publik sendiri berasal dari disiplin ilmu yang lebih luas, yakni administrasi publik. Sebagai bagian dari bidang tersebut, manajemen publik memiliki fokus yang lebih spesifik dalam merancang program-program serta melakukan restrukturisasi organisasi, pengalokasian sumber daya dengan merancang anggaran, manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, evaluasi, hingga pelaksanaan audit program (Ott, Hyde & Shafritz. 1990: 9).

Dari perspektif keilmuan, eksistensi manajemen publik muncul sebagai hasil dari pemikiran yang tampak sederhana namun mendalam. Secara umum, organisasi di sektor publik dikelola oleh manajer sektor publik yang memegang peranan penting dalam mengatur berbagai aspek operasional organisasi tersebut. Oleh karena itu, cara-cara yang diterapkan oleh manusia dalam mengelola organisasi di sektor publik akhirnya dikenal

dengan istilah manajemen publik. Manajemen publik ini lebih menekankan pada pengelolaan internal organisasi sektor publik itu sendiri, yakni tentang bagaimana sektor publik dapat beroperasi dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, meskipun fokus utama terletak pada pengelolaan internal, organisasi sektor publik juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasionalnya, seperti kebijakan publik dan kepentingan politik. Faktor eksternal ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan organisasi sektor publik dari organisasi di sektor lainnya. milik organisasi di sektor lainnya.

1.5.5 Pelayanan Publik

Menurut Roth (1926: 1), pelayanan publik didefinisikan sebagai “suatu bentuk layanan yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat, baik secara umum maupun secara khusus”. Sementara itu, Lewis dan Gilman (2005: 22) memberikan pengertian yang lebih luas dengan menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah bentuk kepercayaan dari publik. Warga negara mengharapkan bahwa pelayanan publik dapat diberikan dengan integritas, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan akan membangun kepercayaan publik, yang pada gilirannya menjadi landasan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan transparan”.

Moenir (2002: 8) mengatakan ada sejumlah unsur pelayanan selain sistem, prosedur dan metode, yaitu unsur personal yang berkontribusi besar dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Keterampilan dan kompetensi petugas pada bidangnya masing-masing tentunya akan mampu melaksanakan kewajiban dengan baik melalui pemberian layanan yang baik pula. Sehingga, petugas pelayanan yang kompeten menjadi aspek penting dalam rangka memperoleh kepuasan dari pengguna layanan tersebut. Selain terampil, pegawai diwajibkan untuk memberi pelayanan dengan sabar dan tentunya ramah dikarenakan heterogennya masyarakat yang bisa ditinjau dari segi pendidikannya maupun perilaku tiap-tiap individunya.

Sarana dan prasarana kemudian menjadi unsur pendukung lain yang artinya pegawai publik itu harus menyediakan fasilitas yang mumpuni sehingga terpenuhinya rasa kenyamanan dari masyarakat selaku pengguna. Kelengkapan dari sarana maupun prasarana tersebut mempermudah pegawai itu sendiri Ketika memberikan pelayanan.

Terakhir, terdapat unsur masyarakat yakni selaku pihak yang menggunakan layanan. Terdapat hak bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan yang prima dari pegawai pelayanan publik. Di samping hak, tentu ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam mematuhi regulasi prosedural pelayanan yang sudah ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari penerima layanan serta pemberi layanan.

1.5.6 Inovasi Sektor Publik

Kemampuan agar senantiasa berinovasi dalam suatu instansi sektor publik diukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dinamakan dengan dimensi inovasi yang mana perkembangannya pada sektor publik adalah sebagai berikut (Solong & Muliadi, 2021):

1) Inovasi Konseptual

Inovasi konseptual merujuk pada usaha untuk menghasilkan ide-ide baru yang segar atau strategi yang rasional, yang diwujudkan dalam bentuk munculnya paradigma, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru. Ciri utama dari inovasi konseptual adalah adanya kebaruan dalam ide atau gagasan yang dapat memperkaya atau melengkapi sistem manajemen organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Lebih dari itu, inovasi ini juga harus dapat diukur sejauh mana ide-ide tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat atau publik yang dilayani, sehingga memberikan dampak positif yang terukur dalam konteks pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri untuk menentukan inovasi di antaranya:

- a. Inovasi tersebut hadir sebagai bentuk transformasi paradigma dari suatu problematika yang terwujud dalam bentuk kebijakan.
- b. Indikator keberhasilannya dapat diukur dengan melakukan perbandingan pada kebijakan terdahulu dengan didasari pada paradigma yang terdahulu pula. Sehingga, inovasi tersebut

dinyatakan berhasil ketika kinerja dari kebijakan yang baru lebih efektif.

- c. Secara umum, perubahan paradigma terjadi akibat adanya dorongan untuk merespons suatu permasalahan dengan pendekatan yang lebih konstruktif, memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta memiliki pandangan yang lebih positif

2) Inovasi *Delivery*

Inovasi *delivery* merupakan metode baru ataupun perubahan metode yang digunakan dalam penyelesaian suatu masalah, pemberian layanan, ataupun interaksi yang terjadi dengan pengguna untuk tujuan menyediakan layanan prima. Tolak ukur dari inovasi ini yaitu metode baru yang digunakan harus menjadi efektif dalam praktiknya ketika menyampaikan informasi kepada pelanggan dengan kriteria yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi *delivery* dapat diterapkan pada saat organisasi dirasa perlu untuk membangun suatu sistematis atau cara penyampaian informasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan untuk dapat diketahui apa yang menjadi informasi baru dan langkah dari kebijakan baru yang sudah diancangkan sebelumnya.
- b. Secara gamblang dan kuat, inovasi ini bisa dirasakan secara langsung manfaatnya oleh pelanggan.

- c. Indikator keberhasilan inovasi ini bisa ditinjau dengan mengacu pada cara penyampaian informasi pada saat mempublikasikan kebijakan dan program kepada pelanggan atau masyarakat luas. Sehingga inovasinya menjadi berhasil pada saat penyampaian informasi tersebut mampu dimengerti secara baik oleh masyarakat.

3) Inovasi Interaksi Sistem

Inovasi interaksi sistem merupakan perubahan cara berinteraksi dengan organisasi atau sebuah tata cara baru untuk berinteraksi bersama stakeholder untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana pola interaksi tiap unit dan *stakeholder* tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program. Acuan yang digunakan untuk inovasi ini adalah adanya kerja sama dan komunikasi pada praktik inovasi tersebut sehingga pelayanan publik berjalan lebih optimal. Berikut kriteria penentuan yang dimaksud:

- a. Inovasi ini muncul ketika organisasi menyadari bahwa cara dan mekanisme yang selama ini digunakan untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan tidak lagi efektif dan menguntungkan
- b. Indikator kesuksesan dari inovasi ini yakni ketika berbagai pihak yang berkepentingan bisa merasakan efektivitas, efisiensi, serta kenyamanan yang lebih baik pada saat berkoordinasi dengan organisasi. Pada umumnya, inovasi tersebut mampu meningkatkan hubungan atau jejaring.

1.5.7 Karakteristik Inovasi

Definisi karakteristik menurut para ahli diantaranya Kim dan Mauborgne dalam konsep *Blue Ocean Strategy* menekankan inovasi nilai (*value innovation*) di mana keberhasilan terletak pada penciptaan produk atau layanan yang berbeda dan bernilai, sehingga kompetisi menjadi tidak relevan. Kemudian menurut Christensen dalam *Disruptive Innovation Theory* menyatakan bahwa inovasi dapat digolongkan sebagai inovasi inkremental atau inovasi disruptif. Karakteristik kunci dari inovasi disruptif adalah kemampuannya untuk mengguncang pasar yang sudah mapan dengan menawarkan solusi yang lebih sederhana dan lebih terjangkau. Dan menurut Utterback dan Abernathy mengemukakan bahwa inovasi memiliki pola evolusi, di mana karakteristik inovasi berubah seiring waktu dari tahap fluid (eksperimen) hingga ke tahap transisi dan akhirnya tahap spesifik (standar). Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas adalah karakteristik penting dari inovasi.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik inovasi menjelaskan atribut yang menentukan sejauh mana inovasi dapat diterima dan diadopsi dalam konteks tertentu. Inovasi yang sukses cenderung memiliki beberapa sifat kunci yaitu memiliki nilai tambah dan keunggulan kompetitif, sesuai atau kompatibel dengan kondisi sosial, budaya, dan teknis pengguna, tidak terlalu kompleks untuk dipahami atau diterapkan, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan

lingkungan.

Dikatakan dalam Diffusion of Innovations Theory dari Geoffrey Moore, dalam bukunya " *Crossing the Chasm, 3rd Edition: Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers*" (2014), memberikan fokus pada tantangan yang dihadapi teknologi inovatif ketika berusaha berpindah dari kelompok *early adopters* ke *early majority* dalam siklus adopsi teknologi. Moore menjelaskan bahwa sering kali terjadi jurang besar (*chasm*) antara kelompok awal yang cepat mengadopsi teknologi baru (*innovators* dan *early adopters*) dengan mayoritas pasar yang lebih pragmatis (*early majority*). Untuk melewati "*chasm*" ini, Moore menyarankan bahwa inovasi harus dimodifikasi atau diposisikan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan mayoritas pasar yang lebih skeptis (Moore, 2014).

Moore menekankan beberapa karakteristik penting yang bisa membantu teknologi melewati "*chasm*" (Moore, 2014):

1) Produk yang Memecahkan Masalah Nyata (*Whole Product*)

Produk atau inovasi baru mampu memecahkan masalah spesifik yang penting bagi pengguna mainstream (*early majority*). Produk tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi harus memenuhi semua aspek kebutuhan pengguna, termasuk dukungan, pelatihan, dan kelengkapan produk.

2) Refrensi Pengguna Nyata (*Refrences and Case Study*)

Pengguna dari kelompok early majority lebih mempercayai inovasi yang telah sukses digunakan oleh orang lain di lingkungan yang mirip dengan mereka. Bukti keberhasilan dalam kasus serupa dapat mempercepat adopsi.

3) Pemasaran yang Tersegmentasi (*Niche Marketig*)

Inovasi harus diposisikan dengan jelas dalam segmen pasar tertentu sebelum mencoba memperluas adopsi. Memahami kebutuhan dan karakteristik spesifik dari pasar sasaran menjadi kunci untuk menembus mayoritas awal.

4) Jaminan Keberhasilan (*Product Leadership*)

Early majority membutuhkan jaminan bahwa produk akan terus didukung dan dikembangkan. Mereka cenderung memilih produk yang memiliki reputasi baik dan dianggap sebagai pemimpin di industrinya.

5) Pemetaan Kompetitif (*Competitive Mapping*)

Inovasi harus diposisikan secara tepat dalam ekosistem teknologi atau solusi yang ada. Produk harus jelas berbeda dari kompetitor dan menawarkan keunggulan yang signifikan.

Penelitian ini peneliti menggunakan *Diffusion of Innovations Theory* yang di tulis oleh Everett Rogers yang mana menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pada kecepatan apa inovasi baru disebarluaskan dan diadopsi di dalam suatu masyarakat. Teori ini pertama kali diperkenalkan melalui

karyanya dengan judul "*Diffusion of Innovations*" tahun 1962, dan telah menjadi opsi sistematika kerja dengan penggunaan terbanyak dalam studi komunikasi dan perilaku adopsi teknologi (Rogers, 1983).

Untuk teori ini peneliti menggunakan 5 variabel yaitu (Rogers, 1983):

1) Keuntungan Relatif (*Relatif Advantage*)

Merujuk pada seberapa besar inovasi tersebut dipandang lebih menguntungkan dibandingkan dengan ide atau teknologi sebelumnya. Jika keuntungan relatif yang dirasakan semakin besar, inovasi yang diadopsi juga menjadi semakin cepat. Contohnya, jika suatu aplikasi baru memberikan manfaat signifikan dibandingkan versi sebelumnya, orang lebih mungkin mengadopsinya.

Peneliti dapat menganalisis aplikasi Srikandi sejauh mana aplikasi ini menawarkan keuntungan dibandingkan dengan sistem pengelolaan arsip yang sebelumnya digunakan. Contohnya, jika Srikandi memberikan peluang untuk manajemen arsip yang lebih efektif, efisien, serta terintegrasi, ini bisa menjadi alasan kuat bagi pegawai untuk mengadopsinya. Penelitian peneliti dapat menyelidiki persepsi pegawai mengenai keuntungan yang mereka rasakan, seperti penghematan waktu, pengurangan kesalahan, atau peningkatan aksesibilitas data.

2) Kesesuaian (*Compability*)

Mengacu pada seberapa besar kesesuaian nilai antara inovasi dengan kebutuhan dan pengalaman yang dirasakan pengguna. Jika inovasi dirasakan selaras dengan budaya, kepercayaan, atau infrastruktur yang ada, adopsinya akan lebih mudah.

Peneliti dapat mengevaluasi seberapa baik aplikasi Srikandi sejalan dengan nilai-nilai, budaya, dan kebutuhan pegawai di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Jika Srikandi didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan infrastruktur yang sudah ada, kemungkinan adopsi akan lebih tinggi. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana pegawai merasakan kesesuaian aplikasi ini dengan cara kerja mereka, dan apakah mereka merasa aplikasi ini mendukung tugas dan tanggung jawab mereka.

3) Kerumitan (*Complexity*)

Mengacu pada seberapa sulit inovasi tersebut dipahami dan digunakan. Semakin kompleks atau sulit suatu inovasi, semakin lambat proses adopsinya. Sebaliknya, inovasi yang dipahami dan digunakan secara lebih mudah akan diterima lebih cepat.

Penelitian peneliti dapat menyelidiki seberapa kompleks aplikasi Srikandi dalam penggunaannya. Jika pegawai menemukan bahwa aplikasi ini sulit dipahami atau digunakan, hal ini dapat menjadi penghalang dalam proses adopsi. Sebaliknya, jika aplikasi tersebut didesain dengan tampilan yang lebih simpel serta mudah dipahami, pegawai lebih cenderung untuk mengadopsinya. Penelitian bisa

mencakup wawancara atau survei tentang pengalaman pegawai saat menggunakan aplikasi dan tantangan yang mereka hadapi.

4) Kemungkinan Dicoba (*Triability*)

Mengacu pada sejauh mana inovasi dapat diuji atau dicoba dalam skala kecil sebelum diadopsi sepenuhnya. Inovasi yang bisa diuji coba akan lebih mudah diadopsi karena pengguna dapat mengevaluasi manfaat dan dampaknya sebelum melakukan komitmen penuh.

Penelitian peneliti dapat mengamati apakah pegawai memiliki kesempatan untuk mencoba aplikasi Srikandi sebelum diimplementasikan secara penuh. Jika mereka dapat melakukan uji coba dalam skala kecil, mereka akan lebih merasa nyaman untuk beralih ke sistem baru. Penelitian ini dapat mengeksplorasi program pelatihan atau *pilot project* yang mungkin telah diterapkan, sekaligus seperti apa pengalaman itu bisa berpengaruh terhadap pilihan pengguna untuk menggunakan aplikasi secara keseluruhan.

5) Kemudahan Diamati (*Observability*)

Tolak ukur dari variabel ini adalah seberapa besar praktik inovasi tersebut bisa disaksikan atau diawasi oleh berbagai pihak. Jika hasil atau manfaat inovasi terlihat dengan jelas oleh pengguna lain, adopsi

cenderung akan lebih cepat karena orang lain bisa melihat bukti konkret dari kesuksesan inovasi tersebut.

Peneliti dapat menganalisis seberapa terlihat manfaat dari aplikasi Srikandi oleh pegawai lain. Jika hasil positif dari penggunaan Srikandi, seperti pengurangan waktu pengarsipan atau peningkatan akurasi, dapat diamati oleh pegawai lainnya, maka ini akan mendorong adopsi lebih lanjut. Penelitian bisa mencakup cara-cara di mana hasil penggunaan aplikasi ini didokumentasikan atau dipromosikan dalam organisasi, serta dampaknya terhadap keputusan pegawai lain untuk mengadopsi aplikasi tersebut.

Dengan menghubungkan lima variabel dari teori Diffusion of Innovations dengan penelitian peneliti, peneliti akan dapat memberikan analisis yang mendalam tentang karakteristik inovasi pengelolaan aplikasi Srikandi. Hal ini akan memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi adopsi dan efektivitas aplikasi dalam konteks Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, serta memberikan rekomendasi untuk mengupayakan peningkatan penerimaan dan penggunaan sistem informasi ini.

Teori *Diffusion of Innovations* oleh Everett Rogers sangat cocok untuk penelitian ini dikarenakan Aplikasi Srikandi sebagai inovasi dalam sistem informasi kearsipan dinamis merupakan contoh nyata dari inovasi teknologi. Teori Rogers memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengeksplorasi bagaimana inovasi ini diperkenalkan, diterima, dan

diadopsi oleh pegawai dan pengelola di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Secara keseluruhan, teori karakteristik inovasi menyediakan alat analisis yang komprehensif untuk memahami proses adopsi dan implementasi aplikasi Srikandi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan inovasi dalam konteks pengelolaan arsip di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Menurut Fontana (2011) dalam (Khoirunnisa et al., n.d.), terdapat sejumlah faktor yang mampu menstimulus sampai akhirnya menghadirkan suatu inovasi dalam organisasi, yaitu:

- 1) Faktor organisasi, membutuhkan individu dan kelompok yang berusaha berpikir untuk melahirkan perencanaan yang inovatif. Sehingga dapat menuai sebuah prosedur melalui aktivitas pencarian ide atau gagasan baru yang kemudian dapat diaplikasikan dan memiliki nilai yang secara unggul ke dalam bentuk produk baru, proses baru, dan sistem administrasi baru.
- 2) Faktor budaya, budaya organisasi yang bisa menciptakan iklim kondusif, mendorong lingkungan yang menjadikan inovasi sebagai prioritas utama dan pegawai merasa dihargai. Hal tersebut berpengaruh besar dalam mendukung dan signifikan dalam mendorong dan menjaga keberlanjutan inovasi.
- 3) Faktor manusia, memiliki peranan dalam rangka menyelaraskan penggunaan teknologi pada sistematisasi organisasi dengan memeriksa

kembali bahwa petugas publik dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan dan mempergunakannya secara optimal.

1.5.8 Electric Goverment

Menurut Bank Dunia, *e-Government* merujuk pada penerapan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah, yang meliputi jaringan area luas (WAN), internet, dan teknologi komunikasi *mobile*, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, sektor bisnis, serta instansi pemerintah lainnya. Secara lebih luas, *e-Government* adalah sebuah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, serta untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54) dalam (Asep Nurwanda, 2020), *E-Government* dapat dipahami sebagai sebuah inisiatif untuk memanfaatkan informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik. Sebagai tambahan, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mengartikan *E-Government* sebagai penyelenggaraan layanan publik yang dilakukan melalui situs resmi pemerintah, yang domainnya mencerminkan identitas pemerintah Indonesia, yaitu dengan penggunaan domain (go.id). Di sisi lain,

menurut Clay G. Weslatt yang menyampaikan pandangannya melalui situsnya, E-Government diartikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, mengurangi biaya secara efektif, serta menyediakan fasilitas layanan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, E-Government juga berperan dalam meningkatkan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya.

E-government atau *electronic government* merupakan pemberdayaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam rangka memfasilitasi informasi dan pelayanan untuk warganya yang terdiri dari :

- 1) *Government to Citizen* (G2C) adalah jenis interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki komunikasi antara keduanya serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemerintahan.
- 2) *Government to Business* (G2B) adalah jenis hubungan antara pemerintah dan dunia usaha. Karena pentingnya hubungan yang baik antara keduanya, tujuan dari G2B adalah untuk mempermudah kegiatan bisnis bagi para pelaku usaha.
- 3) *Government to Government* (G2G) adalah hubungan antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi antara pemerintah-pemerintah yang terlibat, serta mempermudah akses kerja sama di antara pemerintah-pemerintah yang berkepentingan.

- 4) *Government to Employees (G2E)* merupakan tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Petugas pemerintahan dan pegawai negeri yang mampu melakukan peningkatan terhadap performanya yang disertai dengan kesejahteraan pegawai itu sendiri merupakan tujuan dari diadakannya hubungan ini.
- 5) *Government to Non-Profit (G2N)* merupakan tipe hubungan antara pemerintah dengan lembaga atau institusi tanpa laba layaknya suatu parpol, NGO, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar hubungan mereka bisa dikelola dengan baik sampai pada tercapainya tujuan yang selaras dengan fungsi dan wewenangnya baik dari segi pemerintah maupun dari segi lembaga *non-profit* itu sendiri (Fang, 2002).

1.5.9 Pengelolaan Arsip Digital

Arsip bisa berbentuk macam-macam diantaranya akta pendidikan, naskah perjanjian, surat putusan maupun dokumen lainnya yang telah terekam serta bisa digunakan sebagai alat bukti sah. Misswani menyatakan bahwa “Arsip adalah suatu dokumen resmi yang keabsahannya diakui oleh suatu organisasi maupun lembaga hukum” (Wisswani et al., 2019). Oleh karena itu, sering kali arsip dipergunakan untuk membuktikan sesuatu hal yang bersifat kuat. dijadikan sebagai pembuktian kuat akan suatu hal dimana keberadaan arsip mampu memastikan bahwa suatu organisasi/lembaga telah mengeluarkan perekaman kegiatan dengan resmi.

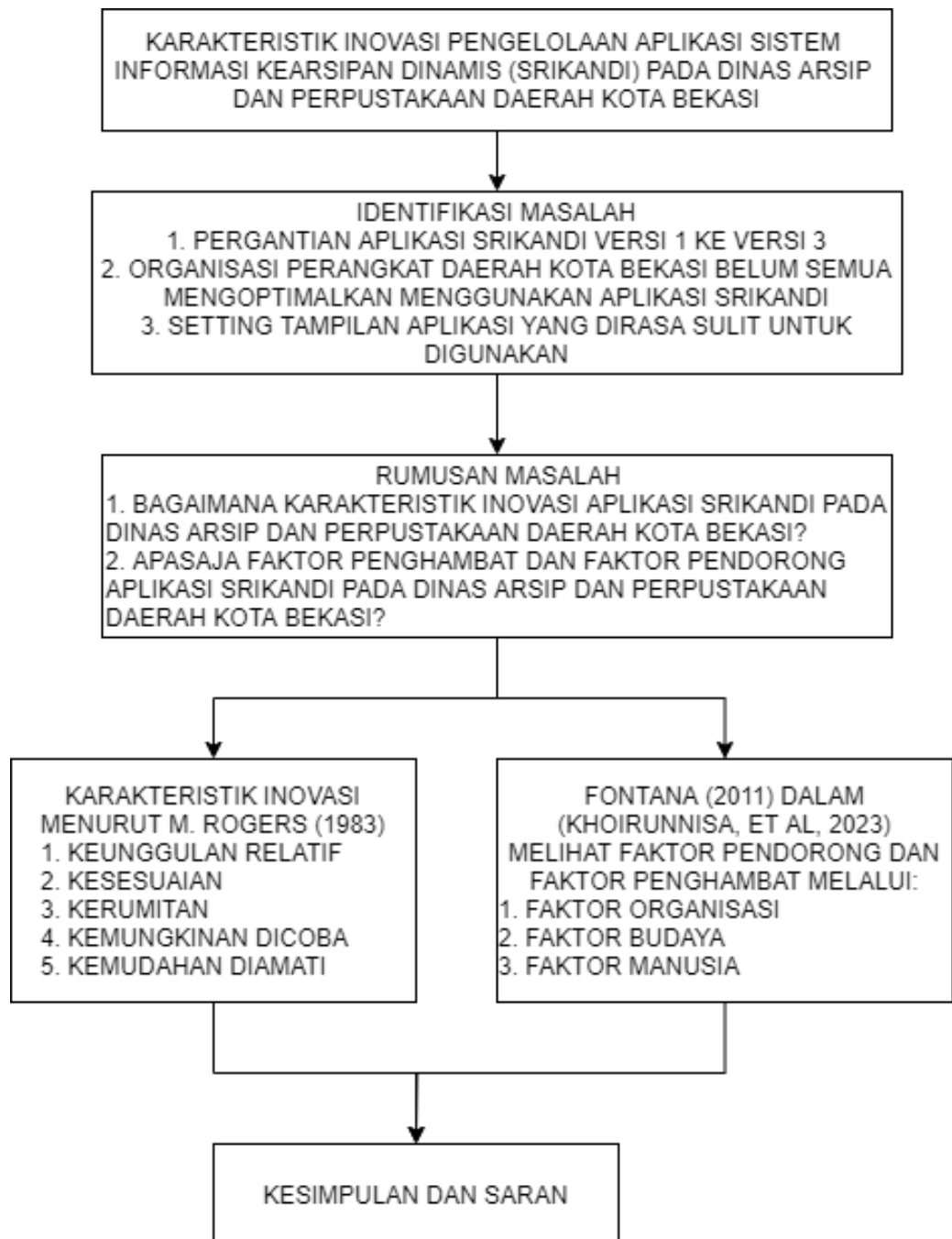
Umumnya, pengelolaan arsip akan dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu arsip statis dan arsip dinamis. Hadiwardoyo (2002: 19) dalam

(Hanunu et al., 2023) mendefinisikan bahwa, “Arsip statis merupakan arsip yang menurut penilaian berdasarkan ketentuan teknik pada persyaratan teknis dan hukum yang sedang berlangsung wajib dipelihara dan dimanajemen oleh lembaga kearsipan karena memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional”. Arsip statis memiliki masalah dependen ataupun lestari yang diurus oleh lembaga kearsipan sebagai wujud perolehan yang terstruktur dan bijaksana terhadap perbendaharaan kearsipan yang tercapai melalui dilaksanakannya aktivitas organisasi yang menciptakannya. Dengan melihat manfaat ini, arsip statis (*archives*) merupakan arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara eksplisit untuk aktivitas pengoperasian dan pengelolaan instansi yang menciptakan arsip tersebut (*creating agency*), namun kemanfaatannya tetaplah lestari. Dalam menjaga kelestarian tersebut, arsip statis ditempatkan pada lembaga dengan fungsi yang sudah berfokus pada pengelolaan arsip statis mulai dari aktivitas penghimpunan, pengolahan, mempreservasi (melakukan pemeliharaan, perawatan, dan produksi kembali), menyediakan jalur, serta memberdayakan arsip statis untuk dijadikan acuan pertanggungjawaban nasional/warisan budaya bangsa terhadap generasi penerus demi kepentingan dari umat manusia.

Adapun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menjelaskan bahwa arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis dibedakan menjadi tiga yakni:

- a. Arsip aktif, adalah arsip yang sering digunakan dalam proses administrasi yang memiliki frekuensi penggunaannya tinggi dan masih dimanfaatkan secara terus menerus.
- b. Arsip inaktif, adalah arsip yang jarang digunakan dalam kegiatan administrasi dan frekuensi penggunaannya menurun.
- c. Arsip vital, adalah arsip yang keberadaannya merupakan sebuah persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, apabila mengalami kerusakan maka arsip tersebut tidak dapat diperbaharui dan apabila hilang arsip tersebut tidak tergantikan.

1.5.10 Kerangka Berpikir



Gambar 1.5 Kerangka Berfikir

1.6 Operasional Konsep

Berdasarkan teori inovasi yang dikatakan Rogers (1983), penelitian ini akan menganalisis karakteristik pengelolaan aplikasi SRIKANDI pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dengan melalui aspek *relative advantage* (keuntungan relative), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *triability* (kemungkinan dicoba) dan *observability* (kemudahan diamati). Serta melihat faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Fontana (2011) melalui faktor organisasi, faktor budaya, faktor manusia. Fenomena tersebut dipilih untuk membantu peneliti menganalisis karakteristik melalui aplikasi SRIKANDI yang berada dibawah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dengan sebagaimana mestinya tujuan dari aplikasi SRIKANDI terlaksana yakni dengan mempermudah arsip digital dan mengefisienkan waktu dan tenaga.

Tabel 1.5 Operasional Konsep

Fenomena	No	Sub Fenomena	Gejala yang diamati dilapangan
Karakteristik Inovasi			
Karakteristik Inovasi Aplikasi SRIKANDI	1.	Keuntungan Relatif (Relative Advantage)	1. Keuntungan yang didapat setelah adanya Aplikasi SRIKANDI 2. Kepuasan dengan adanya Aplikasi SRIKANDI bagi sesama organisasi perangkat daerah
	2.	Kesesuaian (Compatibility)	1. Kesesuaian tetap memantau keberjalanan Aplikasi SRIKANDI pada penggunaan untuk

			organisasi perangkat daerah 2. Kesesuaian dengan kebutuhan
	3.	Kerumitan (Complexcity)	1. Pengadaan SOP, tupoksi dan tanggung jawab 2. Kerumitan mekanisme keberjalanan Aplikasi SRIKANDI
	4.	Kemungkinan dicoba (Triability)	1. Adanya bimbingan teknis bagi organisasi pernakat daerah 2. Adanya sosialisasi yang dilakukan
	5.	Kemudahan Diamati (Observability)	1. Struktur, peran, dan kompetensi pengelola Aplikasi SRIKANDI 2. Kemudahan pengaplikasian bagi organisasi perangkat daerah 3. Fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program 4. Sistematika monitoring dan controlling
Faktor Penghambat dan Pendukung			
Faktor Penghambat dan Pendukung	1.	Faktor Organisasi	1. Kejelasan arah organisasi 2. Pengetahuan pegawai yang piawai dlam mengoperasikan Aplikasi SRIKANDI 3. Kemampuan pimpinan mendelegasikan

			wewenang kepada pegawai 4. Mengetahui mekanisme koordinasi pekerjaan pegawai baik internal maupun dengan organisasi perangkat daerah
	2.	Faktor Budaya	1. Peran kepala dinas dalam pengembangan tim kerja dan kemitraan 2. Mengutamakan menjaga kualitas dan kuantitas pegawai 3. Intensitas dan prosedur layanan
	3.	Faktor Manusia	1. Mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 2. Mengetahui hal-hal yang menunjang pegawai dalam pelaksanaan inovasi 3. Memberikan pegawai ruang eksploratif

Sumber: analisis peneliti

Fenomena dalam penelitian ini mengamati karakteristik inovasi guna mendapat hasil analisis mengenai aplikasi SRIKANDI menggunakan teori karakteristik inovasi dari Rogers (1983) melalui aspek *relative advantage* (keuntungan relative), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *triability* (kemungkinan dicoba) dan *observability* (kemudahan diamati). Serta

melihat faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Fontana (2011) melalui faktor organisasi, faktor budaya, faktor manusia.

1.7 Argumen Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi digital di bidang kearsipan yang sudah lazim digunakan karena kemampuannya dalam mendorong pengelolaan arsip beserta tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif. Aplikasi SRIKANDI ini adalah bentuk kerja sama antara PANRB, BSSN dan ANRI. Tertulis pada Renstra Disarpusda tahun 2019-2023 bahwa Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi yang masih berkembang. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk menindaklanjuti status pengembangan aplikasi tersebut dan menganalisis implementasi Aplikasi SRIKANDI melalui karakteristik inovasi pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif. Definisi menurut Moleong (2019:6) dikatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif cenderung memprioritaskan cara pandang emik pada penelitian yakni melihat sesuatu sebagai bentuk usaha untuk membangun perspektif subjek penelitian secara lebih mendalam yang disampaikan melalui kata-kata, hingga penggambaran yang lebih holistik dan rumit. Salah satu ciri menonjol dari penelitian kualitatif ialah berisi kumpulan data dalam bentuk beragam seperti gambar, kata-kata, dan bukan

terkait dengan numerik. Maka dari itu, hasil penelitian lebih dipenuhi dengan hasil pengutipan data dalam rangka mencerminkan bahasan pada keseluruhan hasil penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam terkait karakteristik inovasi pelayanan publik yang sudah berevolusi menggunakan media elektronik yakni dalam penataan arsip dikemas dalam aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) yang dibawah naungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian lokasi harus sesuai dengan syarat-syarat (a) Sesuai dengan substansi penelitian karena lokasi penelitian yang dituju mampu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang diteliti. (b) Mampu menyediakan data yang cukup dalam memenuhi permasalahan terhadap argument atau hipotesis penelitian terkait karakteristik inovasi melalui sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. (c) Menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang tidak ditentukan agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Adapun situs penelitian adalah pegawai arsiparis di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian didefinisikan sebagai narasumber atau informan yang bersedia untuk menginformasikan berbagai hal yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi data guna menyelesaikan penelitian. Subjek penelitian nantinya akan mempengaruhi penelitian dari segi desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, sehingga dalam memilih subjek peneliti harus bersifat kredibel.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2019:138) teknik *purposive* yaitu teknik memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Berdasarkan teknik tersebut, peneliti memilih *purposive sampling sederhana* maka subjek penelitian terdiri dari:

Tabel 1.6 Subjek Penelitian

Nama Informan	Keterangan
Informan I	Kepala Seksi Ahli Muda Data dan Informasi Kearsipan
Informan II	Arsiparis Ahli Muda
Informan III	Arsiparis Ahli Madya
Informan IV	Arsiparis OPD Sekretariat Daerah
Informan V	Arsiparis OPD Sekretariat Daerah

1.8.4 Jenis Data

Data adalah aspek paling penting pada suatu penelitian dikarenakan melalui data tersebut peneliti terbantu dalam proses pengkajiannya. Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah data kualitatif.

Diterangkan oleh Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2013) pada (M. Sobry & Prosmala Hadisaputra, 2020), analisis data kualitatif merupakan suatu bentuk usaha yang diraih dengan cara bekerja dengan data, mengelompokan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain.

Hennie Boeije (2010) mengungkapkan, analisis kualitatif berkaitan dengan adanya pembagian segmen data pada kelompok yang sesuai yang kemudian dilabeli dengan kode sementara yang pada akhirnya tersinkronisasi hingga menghasilkan kategori dari data. Kategori yang saling terkait kemudian masuk ke tahap penyusunan, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman teoretis tentang fenomena sosial yang sedang diteliti guna menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, data kualitatif yang dianalisis oleh peneliti merupakan hasil dari teknik wawancara yang disajikan dalam bentuk uraian kata-kata atau secara lisan.

1.8.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber (informan). Data primer ini didapatkan dengan proses wawancara bersama Kepala Seksi Ahli Muda Data dan Informasi

Kearipan, Arsiparis ahli Muda, Arsiparis ahli Madya, dan Arsiparis OPD Sekretariat Daerah.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Maknanya, data tersebut didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, atau merupakan data yang didapatkan dari pihak di luar penelitian ini, seperti adanya penelitian lain, atau dari instansi. Data sekunder didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan atau dokumentasi dari buku, jurnal, artikel, maupun laporan penelitian, serta dari berbagai dokumen yang resmi dan relevan dengan topik penelitian seperti pengeluaran undang-undang SPBE, undang-undang pemberlakuan Aplikasi SRIKANDI.

1.8.6 Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang menjadi prioritas dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data. Agar data yang didapatkan bisa memenuhi *standart*, maka peneliti perlu untuk mengetahui teknik pengumpulan data yang baik dan benar. Dalam peneliian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan tidak terpaku pada satu teknik saja, namun telah dilakukan penggabungan beberapa teknik pengumpulan data, yang dihasilkan dengan cara wawancara, studi literatur, dan juga dokumentasi.

1) Wawancara

Dominasi teknik pengumpulan data pada penelitian adalah wawancara sebagai pengumpulan data secara langsung kepada informan dengan melakukan sistem tanya jawab secara lisan dan kemudian menyediakan notulensi ataupun transkrip selama proses wawancara berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung Kepala Seksi Ahli Muda Data dan Informasi Kearsipan, Arsiparis ahli Muda, Arsiparis ahli Madya, dan Arsiparis OPD Sekretariat Daerah.

Penelitian tentang Analisis Karakteristik Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam melakukan wawancara menggunakan jenis wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dipakai untuk mengumpulkan data dengan cara peneliti menyiapkan berbagai pertanyaan untuk ditanyakan kepada informan dengan bantuan perekaman suara melalui *smartphone*. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan cara menghimpun data melalui dilakukannya wawancara dengan bebas dan mendalam. Dimana melakukan wawancara diawali dengan menyampaikan pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi mendalam dan jika dirasa belum paham maka akan ditanyakan lagi sampai memperoleh jawaban yang tepat. Untuk

melakukan wawancara juga dibutuhkan waktu yang sesuai dengan melihat suasana dan keadaan yang diwawancarai sehingga nantinya dapat memperoleh data informasi yang tepat dan valid.

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mencatat semua kejadian yang ada di lapangan dengan mengikutsertakan peneliti dalam aktivitas seseorang yang menjadi target dalam penelitian. Proses pengamatan ini dilakukan dengan cara memperhatikan kejadian di sekitar tempat riset.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pencarian terhadap sumber data pendukung di lapangan dalam bentuk gambar, tabel, dokumen, dan lainnya, kemudian melalui jurnal, berita, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan sebagainya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Sosulski mengemukakan proses interpretasi data adalah "usaha untuk memahami cerita di balik angka-angka." Artinya, interpretasi data bukan hanya soal menyajikan angka, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, serta cara menyajikannya agar efektif dan mudah dipahami audiens. Sosulski menekankan pentingnya berpikir seperti seorang pendidik saat menyampaikan data, dengan fokus pada bagaimana audiens akan memahami dan belajar dari informasi

tersebut. Dengan begitu, pola dan makna penting dapat terlihat jelas melalui penyajian yang terstruktur (Sosulski, 2018). Kristen Sosulski memiliki cara yang unik dalam menganalisis data, dengan tetap memperhatikan beberapa langkah penting untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Dia menekankan pentingnya narasi dalam data, atau yang sering disebut sebagai *data storytelling* (Sosulski, 2018):

- 1) *Data Exploration* adalah langkah pertama di mana menganalisis data untuk memahami pola atau tren yang ada. Menurut Sosulski, para analis sebaiknya melihat data mereka dengan cara yang lebih visual dan mendalam, mencari tahu informasi-informasi yang mungkin tidak langsung terlihat. Proses ini mirip dengan tahap reduksi data dalam model Sugiyono, di mana data disederhanakan dan disaring agar elemen-elemen penting bisa lebih terlihat.
- 2) Analisis data adalah proses mengolah data untuk mengambil informasi yang berarti. Sosulski menekankan bahwa penafsiran data harus mempertimbangkan konteks dan tujuan komunikasi. Ini sejalan dengan tahap tampilan data dalam model Sugiyono, di mana visualisasi seperti grafik atau diagram digunakan untuk menyajikan hasil analisis yang kompleks agar lebih mudah dipahami.
- 3) *Data Communication and Storytelling* adalah tahap terakhir di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Tujuannya adalah agar audiens dapat dengan mudah memahami hasil penelitian. Menurut Sosulski, keberhasilan dalam menginterpretasikan data sangat

tergantung pada kemampuan kita untuk menyampaikan pesan utama dengan jelas dan informatif, sehingga audiens bisa menarik kesimpulan yang tepat. Langkah ini mirip dengan tahap penarikan kesimpulan dalam model Sugiyono.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas data diperoleh dengan memanfaatkan teknik triangulasi sebagai metode pengumpulan data, yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan informasi, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, serta berbagai sumber data, baik data primer maupun sekunder. Penggunaan berbagai teknik dan sumber data ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, akurat, dan valid, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian (Sugiyono, 2013: 241). Oleh karena itu, triangulasi sumber data diterapkan dalam penelitian ini. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan metode pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yang dikenal dengan istilah triangulasi sumber (Sugiyono, 2013: 241).